

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Undang-Undang otonomi daerah, 1999). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koordinasi, dan keterpaduan antar sektor. Pembangunan sektor tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk menyetarakan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB atas dasar harga konstan adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil *size* ekonomi suatu wilayah. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi (PDRB Kab Blora, 2000, hal 2). Secara makro pertumbuhan atau kenaikan PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu :

1. Sektor Pertanian.
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian.
3. Sektor Industri Pengolahan.
4. Sektor Listrik, Gas, dan Air bersih.
5. Sektor Pembangunan.
6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
7. Sektor Angkutan dan Komunikasi.
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.
9. Sektor Jasa-Jasa.

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut diatas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan suatu pembangunan sektoral yang dilaksanakan didaerah.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993
Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 1997 – 2000 (juta rupiah)

No.	Kabupaten / Kota	1997	1998	1999	2000
1.	Cilacap	2.164.332,10	2.051.655,12	2.096.569,60	2.206.667,43
2.	Banyumas	1.055.339,40	983.564,12	988.804,68	1.028.604,67
3.	Purbalingga	621.733,80	588.640,26	595.126,84	611.664,77
4.	Banjarnegara	876.178,89	839.747,97	843.682,85	866.034,16
5.	Kebumen	994.820,97	865.213,30	892.635,02	930.822,49
6.	Purworejo	697.255,58	652.005,26	668.176,79	684.306,71
7.	Wonosobo	570.309,65	484.102,50	491.468,15	513.121,93
8.	Magelang	1.035.324,07	1.002.789,27	1.019.215,60	1.054.929,26
9.	Boyolali	965.959,65	874.133,43	884.481,69	892.046,22
10.	Klaten	1.295.057,63	1.148.045,58	1.153.627,74	1.199.551,88
11.	Sukoharjo	1.195.897,01	1.061.616,80	1.074.923,61	1.112.790,61
12.	Wonogiri	778.762,78	742.361,47	756.802,53	785.059,86
13.	Karanganyar	1.256.500,06	1.109.425,03	1.141.544,82	1.193.085,08
14.	Sragen	731.510,56	664.414,00	677.594,04	696.930,14
15.	Grobogan	770.949,72	697.230,89	674.329,35	749.529,21
16.	Blora	690.746,93	653.529,40	660.453,33	676.637,68
17.	Rembang	517.971,25	466.648,91	480.222,34	504.132,77
18.	Pati	961.872,65	923.174,19	937.480,81	940.874,70
19.	Kudus	3.408.438,73	3.006.674,93	3.030.322,68	3.087.617,87
20.	Jepara	939.091,14	939.352,15	945.638,80	989.279,74
21.	Demak	790.037,43	709.938,94	723.427,58	744.316,44
22.	Semarang	1.198.451,05	985.228,37	999.629,79	1.047.365,80
23.	Temanggung	737.658,22	659.706,26	674.562,25	697.991,69
24.	Kendal	1.640.379,25	1.487.828,82	1.517.442,71	1.550.396,93
25.	Batang	769.665,54	691.365,49	707.438,02	721.649,41
26.	Pekalongan	889.637,63	812.568,88	842.326,27	862.264,91
27.	Pemalang	1.050.820,79	1.033.694,11	1.050.130,47	1.089.043,63
28.	Tegal	931.749,07	847.663,63	869.114,69	911.597,09
29.	Brebes Kota	1.236.706,79	1.264.853,81	1.320.755,76	1.381.023,44
30.	Magelang	318.094,92	294.902,08	306.308,29	317.300,62
31.	Surakarta	1.432.582,37	1.233.018,44	1.250.807,41	1.302.715,92
32.	Salatiga	244.998,97	241.288,25	245.601,15	254.362,19
33.	Semarang	5.793.806,96	4.737.995,92	4.899.241,89	5.142.532,90
34.	Pekalongan	437.613,99	402.405,65	417.953,57	434.639,68
35.	Tegal	350.686,48	334.431,35	341.508,56	359.940,91

Sumber : BPS, Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1997-2000

Tabel 1.1 memberikan gambaran keberhasilan setiap daerah tingkat II di Jawa Tengah dalam melaksanakan strategi perencanaan pembangunan daerah masing-masing, terlihat pada pertumbuhan PDRB. Ketimpangan pertumbuhan PDRB menunjukkan kepada kita bahwa corak perencanaan serta pembangunan yang dilakukan tiap daerah berbeda-beda. Seharusnya tiap daerah tingkat II dapat mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, hal ini mutlak dilakukan untuk menyongsong otonomi daerah, dimana daerah dituntut secara aktif untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuannya sendiri tanpa tergantung dari Pemerintah Pusat.

Pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah harusnya dapat ditingkatkan lagi, hal tersebut tentunya sangat mendukung adanya peningkatan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kabupaten Blora secara sektoral maupun agregat selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, dapat dilihat dari angka indeks perkembangan. Semakin tinggi indeks perkembangannya berarti semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonominya.

Berikut ini pada Tabel 1.2 dapat dilihat beberapa sektor ekonomi yang dominan dalam empat tahun terakhir di Kabupaten Blora dan telah terjadi pergeseran ekonomi yang cukup berarti antara tahun 1997-2000.

Tabel 1.2
Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Blora
Atas Dasar Harga Berlaku Pada Tahun 1997 – 2000
(Tahun 1993 = 100)

Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000
Pertanian	166,81	239,45	249,55	266,00
Pertambangan dan Penggalian	125,72	285,25	387,18	513,06
Industri Pengolahan	180,66	225,44	235,66	259,52
Listrik, Air Bersih	165,00	208,04	230,90	261,46
Perdagangan	180,63	223,33	232,64	247,33
PDRB Kab Blora	158,18	212,33	226,85	247,83

Sumber : BPS, Pendapatan Regional Kabupaten Blora Tahun 2000.

Perkembangan PDRB Kabupaten Blora tahun 2000 menurut harga berlaku secara agregat telah mencapai sebesar 247,83 persen, angka sebesar ini banyak dipengaruhi oleh sektor ekonomi yang dominan di Kabupaten Blora yaitu sektor Pertanian dan perkembangannya mengalami kenaikan dari tahun 1997 sebesar 166,81 persen pada tahun 2000 menjadi 266,00 persen, sektor Perdagangan dari tahun 1997 sebesar 180,63 persen pada tahun 2000 naik menjadi sebesar 247,33 persen, dan sektor Industri Pengolahan pada tahun 1997 sebesar 180,66 sedangkan pada tahun 2000 menjadi sebesar 259,52 persen, sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 1997 sebesar 125,72 tahun 2000 menjadi sebesar 513,06 persen, sektor Listrik dan Air Bersih tahun 1997 sebesar 165,00 tahun 2000 naik menjadi sebesar 261,46 persen (PDRB Kab Blora, 2000, hal 26).

Masalah utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanaan yang matang serta kurang jeli nya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor ekonomi. Disinilah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan daerah agar pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas pada sektor-sektor yang diinginkan. Tujuan akhir dari pembangunan adalah naiknya pertumbuhan ekonomi melalui naiknya PDRB yang berarti pula akan menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“ANALISIS PERGESERAN SEKTOR – SEKTOR EKONOMI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1993 – 2000”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendayagunaan potensi yang telah dimiliki daerah secara optimal. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pergeseran sektor ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang terjadi antara tahun 1993-2000.
2. Bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dari tahun 1993-2000 dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah berdasar analisis *Shift-Share (S-S)*.

3. Sektor-sektor mana yang merupakan sektor potensial (basis) yang merupakan sektor andalan dalam struktur perekonomian daerah tingkat II Blora dari tahun 1993-2000 berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini dalam adalah :

1. Untuk mengetahui pergeseran pangsa pasar setiap sektor ekonomi dengan menggunakan analisis *Shift-Share* (S-S).
2. Untuk mengetahui komponen-komponen yang berpengaruh pada perekonomian daerah tingkat II Blora.
3. Untuk mengetahui sektor-sektor yang merupakan sektor potensial (basis) di daerah tingkat II Blora dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi agar lebih memantapkan peran perencanaan daerah pada tahun-tahun mendatang.
2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian lain yang bemiati pada masalah perencanaan daerah.
3. Bagi penulis penelitian ini merupakan hasil aplikasi serta penerapan langsung dari salah satu alat analisis yang didapat dari bangku kuliah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis dan Sumber Data :

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada serta laporan-laporan instansi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

- a. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
- b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.
- c. Blora Dalam Angka.
- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah.
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Blora.

1.5.2. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu

- a. Analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan rumus, tetapi sifatnya berupa penjelasan dan keterangan-keterangan pelengkap.
- b. Analisis kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan rumus-rumus yang tersedia yang sesuai dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis perencanaan pembangunan yaitu *Shift-Share* (S-S) dan *Location Quotient* (LQ). Teknik analisis *Shift-Share* adalah suatu teknik analisis didalam perencanaan pembangunan yang menganalisa bagaimana pangsa masing-masing sektor

dalam perekonomian daerah yang lebih rendah secara hirarkis tumbuh dari tahun ketahun terhadap perekonomian daerah yang lebih tinggi secara hirarkis.

Teknik *Shift-Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh propinsi (N). Pengaruh pertumbuhan propinsi disebut pengaruh pangsa (*Share*), bauran industri (M), pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi (*proporsional shift*) dan keunggulan kompetitif (C), pengaruh keunggulan kompetitif disebut *regional share*, karena itulah teknik analisis ini dinamakan teknik analisis *Shift-Share*.

Bentuk umum persamaan dari analisis *Shift-Share* dan komponen-komponen (Prasetyo Soepono, 1993) adalah sebagai berikut :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan :

i adalah sektor-sektor yang diteliti.

j adalah variabel ekonomi yang diteliti.

Variabel yang digunakan adalah pendapatan atau nilai sektor yang dinotasikan sebagai (Y).

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot m$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - m)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Dimana r_{ij} , r_{in} , dan r_n mewakili laju pertumbuhan daerah tingkat II dan daerah tingkat I yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{(Y^*_{ij} - Y_{ij})}{Y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(Y^*_{in} - Y_{in})}{Y_{in}}$$

$$r_n = \frac{(Y^*_n - Y_n)}{Y_n}$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor i di wilayah j adalah :

$$D_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

D = variabel wilayah.

N = pertumbuhan daerah tingkat I (propinsi).

M = bauran industri (industri mix).

C = keunggulan kompetitif (regional share).

Y_{ij} = pendapatan sektor i di wilayah j (kabupaten).

Y_{in} = pendapatan sektor i di wilayah n (propinsi).

Y_n = PDRB wilayah n (propinsi).

$*$ = pendapatan tahun akhir.

r_{ij} = laju pertumbuhan sektor I di wilayah j (kabupaten).

r_{in} = laju pertumbuhan sektor I di wilayah n (propinsi).

r_n = laju pertumbuhan PDRB di wilayah n (propinsi).

Penelitian ini juga digunakan juga digunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ), yaitu salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisis sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian suatu daerah, dengan cara mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi dalam suatu daerah yaitu dengan membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian di daerah dalam hal ini daerah Kabupaten Tingkat II Blora dengan sektor-sektor sejenis dalam perekonomian daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.

Rumus untuk menghitung *Location Quotient* (Lincoln Arsyad, 1993) adalah :

$$LQ = \frac{(y_i/y_t)}{Y_i/Y_t}$$

Keterangan :

LQ = Koefisien LQ

y_i = Pendapatan (PDRB) sektor tertentu di daerah tingkat II Blora dalam (jutaan rupiah).

y_t = Pendapatan (PDRB) total daerah tingkat II Blora dalam (jutaan rupiah).

Y_i = Pendapatan (PDRB) sektor tertentu di daerah tingkat I Jawa Tengah dalam (jutaan rupiah).

Y_t = Pendapatan (PDRB) total daerah tingkat I Jawa Tengah dalam (jutaan rupiah).

Adapun klasifikasi LQ adalah sebagai berikut :

- $LQ > 1$ Merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut disuatu kabupaten lebih besar dibandingkan sektor sejenis di tingkat propinsi.
- $LQ = 1$ Berarti kemampuan produksi sektor tersebut disuatu kabupaten sama dengan sektor sejenis ditingkat propinsi.
- $LQ < 1$ Merupakan sektor non basis dan kemampuan produksi sektor tersebut disuatu kabupaten lebih kecil dibanding sektor sejenis pada tingkat propinsi.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan karya tulis ini akan dibagi dalam enam bab dan masing-masing bab terbagi menjadi sub bab. Adapun pembagian bab tersebut adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisis, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sasaran, prioritas dan kebijakan umum pembangunan lima tahun keenam daerah jawa tengah, pertumbuhan ekonomi jawa tengah, prioritas dan kebijakan pemerintah daerah dan perkembangan PDRB Kabupaten Blora.

BAB III. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sejenis.

BAB IV. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian dan untuk memperkuat hipotesa yang dibuat dalam penelitian.

BAB V. ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang hasil-hasil perhitungan dan interpretasi hasil analisis data.

BAB VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan dari hasil analisa data pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Sasaran Pelita VI Propinsi Jawa Tengah.

Sasaran, Prioritas, dan Kebijakan Pelita VI Propinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam “Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994/1995-1998/1999”, meliputi antara lain, tujuan pembangunan daerah yang sasaran umum pembangunan lima tahun keenamnya adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Jawa Tengah melalui peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat dalam meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan batin.

Sasaran bidang ekonomi adalah pematapan industri yang mengarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri didaerah yang mempunyai potensi industri dan makin kukuhnya struktur industri dengan meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dengan hilir, antara industri besar, menengah, kecil dan industri rakyat serta keterkaitan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya, peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dengan tetap mempertahankan swasembada beras menuju swasembada pangan yang didukung industri, penataan dan pematapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin sehat, tangguh dan mandiri serta berperan utama sebagai wadah perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat, peningkatan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang

makin meluas dan mantap, yang secara keseluruhan dilaksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan melalui peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan berusaha, lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

2.2. Prioritas Pelita VI Propinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun keenam daerah dalam rangka pembangunan jangka panjang kedua, maka prioritas pembangunan lima tahun keenam daerah adalah pembangunan sektor-sektor dibidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dikembangkan sebagai berikut :

1. Penataan industri dan keterkaitan antar industri dengan sektor lainnya yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia, ketangguhan pertanian, pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi, pemantapan secara optimal dan tepat guna faktor produksi, sumber daya ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri dengan tetap menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia agar makin meningkat kualitasnya melalui peningkatan produktifitas dengan pendidikan yang makin merata dan bermutu disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap agar dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan pengkajian dan ahli teknologi.
3. Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan seimbang serasi dan selaras, saling memperkuat dengan pembangunan bidang ekonomi sehingga keseluruhan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, mandiri, adil dan makmur dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal.

2.3. Kebijakan Umum Pelita VI Propinsi Jawa Tengah.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan lima tahun keenam nasional, maka kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam daerah Jawa Tengah yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian guna meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan industri ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi di daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor,

- memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.
2. Pembangunan agro industri diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian secara optimal melalui pengembangan dan penguasaan teknologi, pemanfaatan hasil-hasil penelitian, sekaligus meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani dan produsen dengan industri.
 3. Pembangunan industri menghasilkan bahan baku, komponen dan bahan penolong sektor industri rancang bangun dan rekayasa diarahkan agar makin efisien dan mampu memenuhi kebutuhan industri lain sehingga mengurangi ketergantungan pada impor.
 4. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan, industri rumah tangga, serta industri rakyat tradisional diarahkan agar menjadi usaha yang makin efisien dan berkembang mandiri.
 5. Pembangunan peternakan yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, nelayan, peternak, dan masyarakat pedesaan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta mengisi dan memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri sehingga mampu meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi dan menunjang pembangunan wilayah.
 6. Pembangunan pertanian diarahkan untuk tetap melanjutkan dan meningkatkan usaha diservikasi, intensivikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian

dengan perencanaan dan pengolahan pembangunan pertanian yang makin terpadu.

7. Pengolahan usaha pertanian terutama yang berkaitan dengan usaha agroindustri dan agrobisnis, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keunggulan komperatif dan kompetitif, keterampilan masyarakat pedesaan tersedia bahan baku yang cukup dan berkesinambungan, tersedianya investasi yang cukup serta tersedianya prasarana dan fasilitas pelayan lainnya di pedesaan diarahkan pada usaha meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk menjamin kesinambungan usaha pertanian.
8. Pengembangan usaha pertanian skala besar diarahkan pada upaya mendorong perkembangan dan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan usaha pertanian rakyat dan koperasi dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukung sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
9. Pembangunan perdagangan diarahkan pada tercapainya sistem perdagangan yang makin efisien dan efektif serta mampu memanfaatkan dan memperluas pasar.
10. Penyediaan kebutuhan pokok masyarakat lainnya, serta usaha pemasarannya disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan dan jasa transportasi.
11. Pembangunan transportasi diselenggarakan secara efisien untuk dapat berperan sebagai urat nadi kehidupan.

12. Sistem transportasi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah.

2.4.1. Tahun 1995

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah tahun 1995 yang ditunjukkan oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan tahun 1993 adalah sebesar 7,39%. Tingkat pertumbuhan riil tahun 1995 tersebut ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama, ialah sebesar 0,74%. Sehingga pada tahun 1995 terdapat kenaikan nyata dari PDRB perkapita sebesar 6,61%.

Indeks perkembangan PDRB Jawa Tengah tahun 1995 terhadap tahun 1993 dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun kebutuhan listrik dan air bersih sangat terasa sekali, perkembangan listrik tahun 1995 secara riil naik 31,78%. Sedangkan untuk sektor bangunan hanya naik sebesar 12,68%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masih merupakan sektor dominan menunjukkan kenaikan diatas rata-rata Jawa Tengah, dengan pertumbuhan riil sebesar 10,33%, cukup memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 21,43% dengan 18,77% untuk sub sektor perdagangan besar dan eceran, 0,40% untuk sub sektor hotel dan 2,26% untuk restoran.

Sektor angkutan dan komunikasi pada tahun 1995 secara riil naik 9,56% dengan sub sektor pengangkutan naik 7,68% dan komunikasi naik

sebesar 19,50%. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang tidak kalah pentingnya di dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah. Untuk tahun 1995 sektor tersebut secara riil naik 5,62% dimana sub sektor bank naik 7,76% dan sub sektor jasa perusahaan naik sebesar 6,12%, ini berarti bahwa kenaikan tersebut masih dibawah angka rata-rata Jawa Tengah.

2.4.2. Tahun 1996

PDRB Jawa Tengah pada tahun 1996 atas dasar harga berlaku sebesar 5.250.536.063 jutaan rupiah. Selama kurun waktu lima tahun (1994-1999), PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan 1,55 kali, dan secara konstan berkembang 1,23 kali.

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 1996 ditempati oleh sektor listrik, gas dan air bersih dengan kenaikan sebesar 14,03%. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut dikarenakan sampai saat ini kebutuhan listrik, gas dan air bersih dirasa masih banyak dan pemerintah senantiasa berusaha mencukupi akan permintaan konsumen, dengan jalan membangun pusat pembangkit listrik yang baru. Sektor bangunan juga berkembang pesat pada tahun 1996 yaitu 11,24%. Sektor angkutan juga berkembang cukup pesat yaitu 7,85% pada tahun 1994 dan naik menjadi 9,56% pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 menjadi 12,88%. Pertumbuhan terendah diduduki oleh sektor jasa-jasa, hanya naik sebesar 4,13%. Rendahnya sektor jasa-jasa yang didalamnya termasuk sub sektor pemerintahan diharapkan secara nasional naik nol persen (zero growth). Disamping itu peranan sub sektor pemerintahan memberikan

sumbangan sangat besar terhadap sektor jasa sebesar 75% lebih, sehingga pertumbuhan sektor jasa-jasa sangat dipengaruhi oleh sub sektor pemerintahan.

Tabel 2.3 dibawah bisa dilihat bahwa, terdapat beberapa sektor yang perannya terhadap perkembangan PDRB Jawa Tengah meningkat, ada juga sektor yang cenderung mengalami penurunan. Sektor-sektor yang dari tahun 1994-1999 mengalami kenaikan adalah sektor industri, listrik, gas dan air bersih, serta sektor angkutan dan komunikasi. Keadaan ini bisa terjadi karena pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih cepat bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Jawa Tengah yang merupakan sektor agraris sejak tahun 1992 struktur ekonominya sudah mulai digeser. Peranan sektor pertanian pada tahun 1996 hanya mampu memberikan sumbangan sebesar 20,27%.

Sektor industri sejak tahun 1993 sampai tahun 1996 mempunyai peranan yang cukup tinggi dalam perekonomian Jawa Tengah. Pada tahun 1993 sektor ini mempunyai peranan 30,12% meningkat menjadi 31,54% pada tahun 1996. Sektor perdagangan juga cenderung semakin penting dengan peranan 20,02% pada tahun 1993 menjadi 21,58% pada tahun 1996.

2.4.3. Tahun 1997

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1997 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.

PDRB Jawa Tengah pada tahun 1997 atas dasar harga berlaku sebesar 60.296.426,87 jutaan rupiah. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 1993 sampai tahun 1997, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 1,77 kali dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,26 kali.

Tabel 2.2 pada tahun 1997 secara sektoral pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan untuk semua sektor kecuali sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 13,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik dan air bersih semakin bertambah. Sektor pertanian, sektor industri, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi secara nyata terkena dampak krisis ekonomi yang ditunjukkan dengan menurunnya laju pertumbuhan sektor yang bersangkutan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian sebesar -3,20%. Turunnya sektor pertanian disebabkan pada tahun 1997 terjadi gagal panen pada beberapa komoditi tanaman. Hal ini mungkin disebabkan oleh harga pupuk yang meningkat sehingga petani mengurangi dosis pemakaian yang tentunya hal ini akan menurunkan produktivitas tanaman dibanding tahun 1996.

Tabel 2.3 dibawah dapat dilihat bahwa terdapat beberapa sektor yang peranannya terhadap perkembangan PDRB Jawa Tengah meningkat, ada juga yang cenderung mengalami penurunan. Sektor-sektor yang dari tahun 1993-1997 mengalami kenaikan adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor

listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Keadaan ini bisa terjadi karena pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih cepat. Sejak tahun 1993 sampai tahun 1997 sektor industri memberikan sumbangan yang paling dominan yaitu sebesar 31,79% pada tahun 1997. Sedangkan sektor pertanian peranannya terus menurun menjadi 19,05% pada tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi sudah bergeser dari perekonomian dari perekonomian agraris menjadi industri.

2.4.4. Tahun 1998

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibanding tahun sebelumnya.

PDRB Jawa Tengah pada tahun 1998 seperti terlihat pada tabel 2.1 diatas atas dasar harga berlaku sebesar 84.610.222,51 jutaan rupiah selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 1994 sampai tahun 1999, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 2,48 kali dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,12 kali.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 1998 seperti terlihat pada Tabel 2.2 secara sektoral hampir diseluruh sektor mengalami penurunan dan tumbuh negatif, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih. Pertumbuhan

positif yang dialami sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,64% memberikan indikasi bahwa listrik dan air bersih merupakan kebutuhan penting dari masyarakat.

Sektor-sektor ekonomi lainnya yang berperan terhadap merosotnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, antara lain sektor industri pengolahan, bangunan, keuangan. Pertumbuhan terendah dialami oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-34,20%), hal ini sebagai akibat kinerja perbankan yang tidak sehat.

Dampak krisis ekonomi secara langsung memberikan pengaruh terhadap peranan sektor-sektor ekonomi. Pada tabel 2.3 dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa sektor yang peranannya terhadap perkembangannya PDRB Jawa Tengah ada yang meningkat, ada juga yang cenderung mengalami penurunan. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Khususnya untuk pertanian, dalam masa krisis jauh lebih tahan dibanding sektor-sektor lainnya sehingga peranannya meningkat.

2.4.5. Tahun 1999

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1999 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

PDRB Jawa Tengah pada tahun 1999 seperti terlihat pada tabel 2.1 dibawah atas dasar harga berlaku sebesar 101373292,68 jutaan rupiah. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 1994 sampai tahun 1999, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 2,98 kali dan atas harga konstan mengalami kenaikan 1,16 kali.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 1999 seperti terlihat pada tabel 2.2 secara sektoral hampir diseluruh sektor mengalami kenaikan untuk semua sektor. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor bangunan sebesar 11,93%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor bangunan semakin dominan dalam meningkatkan PDRB.

Sektor-sektor ekonomi lainnya yang berperan terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, antara lain sektor bangunan, listrik, gas dan air bersih, angkutan dan komunikasi. Pertumbuhan terendah dialami oleh sektor jasa-jasa sebesar -0,20%. Hal ini sebagai akibat peranan sub sektor pemerintah yang memberikan sumbangan sangat kecil terhadap sektor jasa.

Krisis ekonomi pada tahun 1999 sudah mulai membaik meskipun belum pulih sepenuhnya. Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa sektor yang peranannya terhadap perkembangan PDRB Jawa Tengah ada yang meningkat, ada juga yang cenderung mengalami penurunan. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi. Keadaan ini bisa terjadi karena pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih cepat.

Mulai tahun 1997-1999 sektor industri sumbangannya semakin menurun sebesar 31,79% pada tahun 1997, dan menurun 30,98% pada tahun 1998, dan 30,58% pada 1999. Sedangkan sektor pertanian pada tahun 1997-1999 mulai meningkat kembali, sebesar 19,05% pada tahun 1997, dan 20,49% pada tahun 1998 dan 20,74% pada tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi sudah bergeser kembali menjadi perekonomian agraris.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Serta Perkembangannya di Jawa Tengah Tahun 1993-1999

Tahun	PDRB Adh Berlaku		PDRB Adh Konstan 1993	
	Nilai (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
1994	39.303.565,04	115,67	36.345.174,48	106,96
1995	46.586.032,91	137,10	39.013.952,64	114,82
1996	52.505.360,63	154,52	41.862.203,72	123,20
1997	60.296.426,87	177,45	43.129.838,90	126,93
1998	84.610.222,51	249,01	38.065.273,35	112,03
1999	101.373.292,68	298,34	39.394.513,73	115,84

Sumber : BPS Jawa Tengah, PDRB Tahun 1994-1999

Tabel 2.2
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 1994-1999
(%)

Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	0,37	5,51	3,37	3,20	-3,35	3,07
Pertambangan dan Penggalian	6,21	8,94	11,85	11,35	-7,11	5,94
Industri Pengolahan	10,63	8,29	8,71	2,87	-14,61	2,82
Listrik, Gas dan Air Bersih	15,88	14,91	14,03	13,47	3,64	10,38
Bangunan	5,23	7,08	11,24	6,37	-32,10	11,93
Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,44	9,99	8,35	6,40	-9,00	3,20
Angkutan dan Komunikasi	7,85	9,56	12,88	3,61	-0,09	10,29
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,71	5,62	7,11	7,989	-34,20	3,77
Jasa-jasa	3,01	2,76	4,13	2,64	-9,60	-0,20
PDRB	6,96	7,34	7,30	3,03	-11,74	3,49

Sumber : BPS Jawa Tengah, PDRB Tahun 1994-1999

Tabel 2.3
Struktur Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 1994-1999

Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	21,41	21,05	20,28	19,05	20,86	20,74
Pertambangan dan Penggalian	1,19	1,21	1,26	1,36	1,43	1,46
Industri Pengolahan	31,15	31,43	31,84	31,79	30,76	30,58
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,73	0,78	0,83	0,91	1,07	1,14
Bangunan	4,65	4,63	4,81	4,96	3,82	4,13
Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,86	21,37	21,58	22,29	22,98	22,91
Angkutan dan Komunikasi	3,79	3,87	4,07	4,10	4,64	4,95
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,14	5,06	5,05	5,29	3,95	3,96
Jasa-jasa	11,08	10,60	10,29	10,25	10,50	10,13
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Jawa Tengah, PDRB Tahun 1994-1999

2.5. Prioritas dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

Krisis moneter yang mulai terjadi sejak pertengahan tahun 1997, dan berlanjut menjadi krisis ekonomi sangat terasa di daerah. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kelangkaan barang tertentu dan perubahan harga yang tidak menentu dan cenderung terus meningkat, telah menurunkan daya beli masyarakat sehingga semakin meningkatkan jumlah keluarga miskin serta meluasnya pengangguran terbuka. Dampak dari krisis ekonomi ini apabila tidak segera diatasi akan meluas pada kehidupan sosial politik serta budaya bangsa, yaitu semakin meningkatnya penyakit sosial dan akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah.

Keadaan yang demikian sangat memerlukan upaya-upaya untuk dapat segera mengembalikan kondisi ekonomi ke arah kondisi normal ataupun mendekati arah normal, dengan melalui tahap penyelamatan, pemulihan, stabilisasi dan pengembangan yang meliputi bidang ekonomi, politik, hukum dan agama serta sosial budaya. Untuk mencapai target tersebut sangat perlu dibutuhkan bantuan serta dukungan dari berbagai elemen sosial masyarakat tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat atau rakyat hal tersebut mustahil dapat tercapai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka disusun Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 1999/2000.

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah sebagai prioritas dan alternatif perencanaan serta kebijaksanaan pembangunan reformatif dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan daerah disusun dengan tujuan untuk :

1. Mengatasi krisis ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.
3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental aparat, dunia usaha, dan masyarakat Kabupaten Blora.
4. Meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya.

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan khusus yaitu pengintegrasikan sektor-sektor pembangunan kedalam bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, agama, dan sosial budaya dalam rangka mencapai penyelamatan dan normalisasi kehidupan daerah Kabupaten Blora.

(Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Tingkat II Blora 1999/2000).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan kebijaksanaan bagi pemerintah, legislatif daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menyusun dan melaksanakan program, proyek dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Blora. Sedangkan tujuannya adalah terlaksananya pembangunan daerah yang terpadu, efektif untuk mencapai hasil yang optimal serta dapat dinikmati masyarakat secara adil dan merata, guna menuju Blora Baru sebagaimana yang kita inginkan bersama.

Pembangunan Kabupaten Blora diarahkan untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam aktifitas ekonomi yang didukung adanya peningkatan derajat

kesehatan, tingkat pendidikan dan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.

Kebijakan yang ditempuh untuk menuju kearah yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai serta mampu mendukung usaha perekonomian masyarakat.

(Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Blora, Tahun 2000).

2.6. Perkembangan PDRB Kabupaten Blora

2.6.1. Tahun 1995

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 1995 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Kabupaten Blora mengalami kenaikan yang cukup memuaskan bila dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.8 menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Blora pada tahun 1995 atas dasar harga berlaku sebesar 762.454,29 jutaan rupiah. Selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 1993 sampai tahun 1995, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 1,20 kali dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,07 kali.

Tabel 2.7 pada tahun 1995 secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora mengalami kenaikan untuk hampir disemua sektor kecuali

sektor listrik, air bersih yang turun sebesar 5,23 % dari 14,97 % bila dibanding tahun sebelumnya, dan sektor perdagangan turun sebesar 6,70 % dari 15,26 % pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 1995 dialami oleh sektor industri sebesar 14,61 %, sedangkan pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian sebesar 1,32 %.

Sektor-sektor lainnya yang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya antara lain, sektor pertanian sebesar 1,32 %, sektor pertambangan sebesar 7,22 %, sektor industri sebesar 14,61 %, sektor bangunan sebesar 3,94 %, sektor angkutan sebesar 10,20 %, sektor keuangan sebesar 8,02 %, dan sektor jasa-jasa sebesar 2,57 %.

2.6.2. Tahun 1996

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 1996 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Kabupaten Blora mengalami penurunan yang cukup drastis bila dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.8 menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Blora pada tahun 1996 atas dasar harga berlaku sebesar 828.339,74 jutaan rupiah. Selama kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 1993 sampai tahun 1996, PDRB Kabupaten Blora atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 1,31 kali dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,11 kali.

Tabel 2.7 pada tahun 1996 secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora mengalami penurunan untuk semua sektor kecuali sektor

pertanian yang naik sebesar 5,58 %, sektor bangunan sebesar 4,25 % yang masing-masing untuk kedua sektor tersebut mengalami kenaikan bila dibanding pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor pertanian sebesar 5,58 %, sedangkan pertumbuhan terendah dialami sektor pertambangan sebesar 0,59 %. Untuk sektor yang mengalami penurunan yang cukup drastis bila dibanding dengan tahun sebelumnya dialami pada sektor industri yang tahun sebelumnya sebesar 14,61 % turun menjadi 2,62% pada tahun 1996.

Sektor-sektor lainnya yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya antara lain, sektor pertambangan sebesar 0,59 %, sektor industri sebesar 2,62 %, sektor listrik, air bersih sebesar 3,50 %, sektor bangunan sebesar 4,25 %, sektor perdagangan sebesar 2,61 %, sektor angkutan sebesar 5,25 %, sektor keuangan sebesar 4,10 %, dan sektor jasa-jasa sebesar 2,32 %.

2.6.3. Tahun 1997

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 1997 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Kabupaten Blora mengalami penurunan yang cukup drastis bila dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.8 menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Blora pada tahun 1997 atas dasar harga berlaku sebesar 999.302,93 jutaan rupiah. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 1993 sampai tahun 1997, PDRB Kabupaten

Blora atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 1,58 kali dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,14 kali.

Tabel 2.7 pada tahun 1997 secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora mengalami penurunan untuk semua sektor kecuali sektor listrik, air bersih, sektor angkutan, dan sektor perdagangan yang mengalami kenaikan sebesar 9,03 % untuk sektor listrik, 6,32 % sektor perdagangan, dan 7,24 % pada sektor angkutan. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor listrik, dan air bersih sebesar 9,03 %, sedangkan pertumbuhan terendah dialami sektor pertambangan sebesar -2,10 %. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik dan air bersih semakin bertambah. Sedangkan sektor-sektor lainnya yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya antara lain, sektor pertanian sebesar 3,35 %, sektor pertambangan sebesar -2,10 %, sektor industri sebesar 1,91 %, sektor bangunan sebesar 0,12 %, sektor keuangan sebesar 0,59 %, dan sektor jasa-jasa sebesar 0,47 %, secara nyata terkena dampak krisis ekonomi yang ditunjukkan dengan menurunnya laju pertumbuhan sektor yang bersangkutan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.6.4. Tahun 1998

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 1998 sebesar -5,48%, hal ini berarti masih lebih baik pertumbuhannya jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tercatat sebesar -10,48 %. Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora selama tahun 1998 sebagian

besar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 1997. Dari sembilan sektor ekonomi yang ada, sektor yang pertumbuhannya menunjukkan angka yang positif adalah sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang bisa bertahan dalam masa krisis, dengan menyumbangkan pertumbuhan sebesar 0,83 % disamping sektor listrik, gas, dan air bersih yang tumbuh sebesar 6,90 %. Sedangkan sektor ekonomi yang paling terpuak akibat krisis ekonomi adalah sub sektor bank dan sektor bangunan yang pertumbuhannya mencapai -69,83 % dan -49,49 %.

Struktur ekonomi Kabupaten Blora selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 1993 masih merupakan daerah agraris. Hal ini terlihat dari peranan masing-masing sektor pertanian peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Blora sebesar 45,01 %, sedangkan sektor yang lain seperti perdagangan, dan jasa-jasa menempati urutan kedua dan ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Blora dengan kontribusi masing-masing sebesar 17,21 % dan 12,47 %.

PDRB Kabupaten Blora dilihat secara makro ekonomi tahun 1998 atas dasar harga berlaku sebesar 1.343,799 milyar rupiah dan sebesar 683,905 milyar rupiah atas harga konstan 1993. Selama kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 1993-1998 PDRB Kabupaten Blora telah terjadi kenaikan 2,14 kali lipat besarnya PDRB (tahun 1993 = 631,751 milyar rupiah), dan secara riil (konstan) hanya naik 1,01 kali lipat dari tahun 1993 tersebut.

2.6.5. Tahun 1999

Kondisi perekonomian Kabupaten Blora tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 1,34 %. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora jauh lebih baik bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 0,27 % maupun ditingkat nasional yang hanya 0,12 %.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 secara sektoral mulai mengalami kenaikan diseluruh sektor dan tumbuh secara positif (kecuali sektor industri yang -1,72 %). Sektor-sektor yang memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi secara rinci terlihat pada sektor pertambangan, keuangan, pertanian, angkutan, jasa-jasa dan sektor bangunan. Sedangkan sektor yang masih jalan ditempat dengan pertumbuhan minus adalah sektor industri. Sektor pertambangan pada tahun 1999 ini pertumbuhannya begitu signifikan sebesar 7,09 % disebabkan karena adanya deregulasi dan peningkatan produksi pada sub sektor Migas. Disamping itu sektor lain yang juga pertumbuhannya cukup menggembirakan yaitu sektor listrik dan air bersih dengan pertumbuhan sebesar 3,44 %, diikuti oleh sektor perbankan sebesar 2,65 %, sektor pertanian sebesar 1,32 %, sektor perdagangan sebesar 1,15 %, sektor jasa-jasa sebesar 0,63 %, dan sektor bangunan sebesar 0,22 %. Sedangkan sektor ekonomi yang pertumbuhannya masih minus akibat belum selesainya badai krisis adalah sektor industri sebesar -1,72 %.

PDRB Kabupaten Blora tahun 1999 masih didominasi oleh sektor pertanian yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam memberikan nilai tambah yaitu sebesar 45,00 %. Sedangkan sektor lainnya yang menempati

urutan kedua sebagai penyumbang terbesar masih pada sektor perdagangan dan jasa-jasa yang masing-masing sebesar 17,17 % dan 12,39 %.

PDRB Kabupaten Blora dilihat secara makro ekonomi tahun 1999 atas dasar harga berlaku sebesar 1.433,16 milyar rupiah dan atas harga konstan sebesar 693,069 milyar rupiah. Selama kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 1993-1999 PDRB Kabupaten Blora telah terjadi kenaikan 2,26 kali lipat besarnya PDRB (tahun 1993 = 631,751 milyar rupiah), dan secara riil (konstan) hanya naik 1,09 kali lipat dari tahun 1993 tersebut.

2.6.6. Tahun 2000

Kondisi perekonomian Kabupaten Blora selama tahun 2000 mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,54%, untuk Nasional dan Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi selama tahun 2000 masing-masing sebesar 4,77 % dan 3,96 %. Sehingga pertumbuhan Kabupaten Blora jika dibandingkan dengan Nasional dan Jawa Tengah terlihat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 secara sektoral mulai mengalami kenaikan hampir di seluruh sektor dan tumbuh secara positif. Sektor-sektor yang memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi secara rinci terlihat pada sektor Listrik dan Air Bersih, Pertambangan, Keuangan, Pertanian, Bangunan, Industri, Perdagangan, Angkutan dan jasa-jasa. Sektor industri yang ditahun sebelumnya masih jalan ditempat ternyata mampu bergerak kearah positif. Sektor listrik dan air bersih pada pada tahun 2000 ini pertumbuhannya cukup baik sebesar 5,28 % disebabkan karena adanya

deregulasi dan bertambahnya pelanggan atau pemakai listrik dan air di Kabupaten Blora. Disamping itu sektor lain yang juga pertumbuhannya cukup menggemirakan yaitu sektor Pertambangan dengan pertumbuhan sebesar 4,34 %, diikuti oleh sektor perbankan 3,84 %, sektor pertanian 3,18 %, sektor industri 2,90 %, sektor bangunan 2,89 %, Perdagangan 1,35 %, sektor angkutan 1,05 % dan sektor jasa-jasa sebesar 0,48 %.

Melihat dari gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Blora tahun 2000 struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari kontribusinya masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Blora, sektor pertanian punya peranan yang cukup besar dalam memberikan nilai tambah yaitu sebesar 45,28 %. Sektor lainnya yang menempati urutan kedua sebagai penyumbang terbesar masih pada sektor perdagangan dan jasa-jasa masing-masing sebesar 16,97 % dan 12,14 %.

PDRB Kabupaten Blora dilihat secara makro ekonomi tahun 2000 atas dasar harga berlaku sebesar 1.565,662 milyar rupiah dan atas harga konstan sebesar 710,703 milyar rupiah. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir dari tahun 1993-2000 PDRB Kabupaten Blora telah terjadi kenaikan 2,48 kali lipat besarnya PDRB (tahun 1993 = 631,751 milyar rupiah), dan secara riil (konstan) hanya naik 1,13 kali lipat dari tahun 1993 tersebut.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1993-2000
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	283.390,38	297.631,18	310.342,13	348.435,43	472.726,84	678.582,66	707.188,19	753.830,71
2. Pertambangan	32.986,81	35.202,12	39.959,09	42.223,40	41.470,44	94.094,76	127.718,51	169.241,65
3. Industri	32.602,00	38.450,76	46.343,42	49.837,92	58.898,42	73.496,38	78.829,07	84.604,65
4. Listrik, Air Bersih	2.648,20	3.221,55	3.682,00	3.857,64	4.369,56	5.509,34	6.114,68	6.923,93
5. Bangunan	40.868,94	47.271,07	51.454,75	55.446,53	61.454,75	49.450,97	50.130,43	52.413,59
6. Perdagangan	92.540,30	114.493,43	136.798,55	146.393,82	167.155,23	206.666,69	215.283,96	228.877,00
7. Angkutan	21.613,55	24.296,63	26.978,80	28.763,76	33.006,63	38.290,35	40.312,27	43.607,51
8. Keuangan	44.151,62	50.307,16	56.406,92	60.001,59	64.537,72	83.287,53	93.429,36	107.798,21
9. Jasa-jasa	80.950,90	84.248,21	90.485,63	93.379,65	95.683,34	114.420,44	116.099,74	118.364,22
PDRB Kab BLORA	631.751,70	695.112,11	762.454,29	828.339,74	999.302,93	1.343.799,12	1.433.106,14	1.565.106,14

Sumber : BPS Kab. Blora, Pendapatan Regional Kab Blora Tahun 2000.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Pada Tahun 1993-2000
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	283.390,38	276.115,25	279.766,80	295.372,35	305.266,48	307.812,86	311.886,51	321.809,63
2. Pertambangan	32.986,81	33.784,68	36.223,43	36.436,49	35.671,29	32.283,79	34.571,21	36.071,21
3. Industri	32.601,00	35.377,79	40.547,08	41.607,97	42.401,26	42.106,89	41.382,65	42.582,65
4. Listrik, Air Bersih	2.648,20	3.044,64	3.203,95	3.316,17	3.615,74	3.865,30	3.998,45	4.209,74
5. Bangunan	40.868,94	41.419,77	43.051,44	44.881,44	44.933,44	22.472,89	22.521,43	23.171,43
6. Perdagangan	92.540,30	106.661,98	113.812,97	116.778,41	124.160,98	117.670,70	119.023,82	120.633,82
7. Angkutan	21.613,55	22.633,31	24.941,34	26.251,14	28.150,78	24.999,76	25.201,77	25.466,67
8. Keuangan	44.151,62	45.841,61	49.520,04	51.550,94	51.854,63	47.380,25	48.637,17	50.503,12
9. Jasa-jasa	80.950,90	82.976,27	85.111,38	87.082,92	87.488,59	85.312,78	85.846,25	86.255,14
PDRB Kab BLORA	631.751,70	647.855,30	676.178,83	703.277,83	723.543,83	683.905,22	693.069,26	710.703,41

Sumber : BPS Kab. Blora, Pendapatan Regional Kab Blora Tahun 2000.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora
Atas Dasar Harga Berlaku Pada Tahun 1993-2000
(%)

Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	-	5,03	4,27	12,27	35,67	43,55	4,22	6,60
2. Pertambangan	-	6,72	13,51	5,67	-1,78	126,90	35,73	32,51
3. Industri	-	17,94	20,53	7,54	18,18	24,78	4,53	10,12
4. Listrik, Air Bersih	-	21,27	14,65	4,77	13,27	26,08	10,99	13,23
5. Bangunan	-	15,67	8,85	7,76	10,84	-19,53	1,37	4,55
6. Perdagangan	-	23,72	19,48	7,01	14,18	23,64	4,17	6,31
7. Angkutan	-	12,41	11,04	6,62	14,75	16,01	5,28	8,17
8. Keuangan	-	13,94	12,13	6,37	7,56	29,05	12,18	15,38
9. Jasa-jasa	-	4,07	7,40	3,20	2,47	19,58	1,47	1,95
PDRB Kab BLORA	-	10,03	9,69	8,64	20,64	34,47	6,65	9,25

Sumber : BPS Kab. Blora, Pendapatan Regional Kab Blora Tahun 2000.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Pada Tahun 1993 -2000
 (%)

Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	-	-2,57	1,32	5,58	3,36	0,83	1,32	3,18
2. Pertambangan	-	2,42	7,22	0,59	-2,10	-9,50	7,09	4,34
3. Industri	-	8,52	14,61	2,62	1,91	-0,69	-1,72	2,90
4. Listrik, Air Bersih	-	14,97	5,23	3,50	9,03	6,90	3,44	5,28
5. Bangunan	-	1,35	3,94	4,25	0,12	-49,99	0,22	2,89
6. Perdagangan	-	15,26	6,70	2,61	6,32	-5,23	1,15	1,35
7. Angkutan	-	4,72	10,20	5,25	7,24	-11,19	0,81	1,05
8. Keuangan	-	3,83	8,02	4,10	0,59	-8,63	2,65	3,84
9. Jasa-jasa	-	2,50	2,57	2,32	0,47	-2,49	0,63	0,48
PDRB Kab BLORA	-	2,55	4,37	4,01	2,88	-5,48	1,34	2,54

Sumber : BPS Kab. Blora, Pendapatan Regional Kab Blora Tahun 2000.

Tabel 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993
Serta Perkembangannya Di Kabupaten Blora Tahun 1993-2000

Tahun	PDRB Adh Berlaku		PDRB Adh Konstan 1993	
	Nilai (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
1993	631.751,70	100,00	631.751,70	100,00
1994	695.112,11	110,03	647.855,30	102,55
1995	762.454,29	120,69	676.178,43	127,03
1996	828.339,74	131,12	703.277,83	111,32
1997	999.302,93	158,18	723.543,19	114,53
1998	1.343.799,12	212,71	683.905,22	108,26
1999	1.433.106,14	226,85	693.069,26	109,71
2000	1.565.661,47	247,83	710.703,43	112,50

Sumber : BPS Kab. Blora, Pendapatan Regional Kab Blora Tahun 2000.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari penelitian yang akan dilakukan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

1. Yuman Idris (1997), "Analisa Struktur Perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Aceh". Penelitian ini menggunakan *Shift-Share* dan *Location Quotient*. Adapun persamaan atau rumus yang digunakan adalah analisis *Shift-Share*, yaitu

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan :

i adalah sektor-sektor yang diteliti.

j adalah variabel ekonomi yang diteliti.

Variabel yang digunakan

$$D_{ij} = Y_{ij} - Y_{ij}^*$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot m$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - m)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Persamaan atau rumus dari *Location Quotient*, yaitu :

$$LQ = \frac{(y_i / y_t)}{Y_i / Y_t}$$

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, dalam struktur perekonomian Aceh tahun 1983-1993 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang kontribusinya terbesar dalam pembentukan PDRB. Berdasar analisis *Shift-Share* tahun 1983-1993 menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Daerah Istimewa Aceh adalah positif, kalau dilihat dari komponen pertumbuhan nasional maka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Daerah Istimewa Aceh juga positif. Dilihat dari pengaruh komponen bauran industri menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor sewa rumah, sektor pemerintahan dan pertanahan, serta sektor-sektor jasa menunjukkan kontribusi yang negatif, ini berarti pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih lambat daripada sektor-sektor sejenis secara nasional. Sedangkan sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta bank dan lembaga keuangan menunjukkan nilai yang positif.

Pengaruh keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa kontribusi pertumbuhan untuk sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor bank dan lembaga keuangan, sektor pemerintahan dan pertanahan, serta sektor jasa-jasa menunjukkan nilai positif, sedang sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor sewa rumah adalah negatif. Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi Daerah Istimewa Aceh menunjukkan nilai positif. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan

sektor yang berperan paling besar terhadap pembentukan PDRB. Disusul sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Berdasar analisis *Location Quotient* sektor yang paling potensial dan paling dapat diandalkan dalam pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Aceh selama tahun 1983-1993 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

2. David Rosidi (1997), "Analisa Potensi dan Strategi Pembangunan Regional Jawa Barat". Dalam penelitian ini digunakan *Location Quotient*. Persamaan atau rumus yang digunakan adalah *Location Quotient* yaitu :

$$LQ = \frac{(y_i / y_t)}{Y_i / Y_t}$$

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sektor yang memiliki potensi tinggi di Jawa Barat yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, karena sektor tersebut memiliki permintaan yang paling besar. Kesempatan kerja di Jawa Barat relatif besar namun belum dapat mengimbangi jumlah penduduk yang pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan kesempatan kerja, yang mana peluang kerja di sektor formal seperti sektor perbankan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor-sektor formal lainnya cukup banyak tetapi memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat. Tenaga kerja di sektor formal memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor informal.

3. Sri Kusrintri Yuniarti (1997), “Arah Pergeseran Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Persamaan atau rumus yang digunakan adalah analisis *Shift-Share*, yaitu :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan :

i adalah sektor-sektor yang diteliti.

j adalah variabel ekonomi yang diteliti.

Variabel yang digunakan :

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot m$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - m)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Berdasar dari hasil analisis *Shift-Share* yang dilakukan tampak bahwa dalam PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta sektor yang menjadi basis ekonomi atau sektor unggulan adalah sektor jasa dan industri pengolahan. Selain itu dari analisa *Shift-Share* tampak pula ketidak unggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dari perubahan pendapatan didaerah DIY yang tidak setara dengan pertumbuhan nasional, dengan dijumpai pada sektor pertanian, listrik, gas dan air bersih serta keuangan, persewaan perusahaan. Jadi ada 3 sektor dari 9 sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkembang lebih lambat dari laju pertumbuhan nasional rata-rata sektor ini. Dan Sri Kusrini menemukan telah terjadi pergeseran dalam posisi kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dalam

posisi kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dari sektor pertanian ke sektor industri.

Penyajian telaah pustaka ini dilakukan untuk melihat arti penting penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dan terkait sehingga dapat membantu proses penyusunan skripsi yang dilakukan.

4. Titis Wuryaningsih (1997), “Analisa Ketimpangan Pendapatan Daerah Tingkat II terhadap Pendapatan Propinsi dan Potensi Sektoral dalam Pengembangan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian ini digunakan alat analisa *Shift-Share*, *Location Quotient* serta *Indeks Williamson*. *Indeks Williamson* merupakan suatu alat analisa yang digunakan untuk mengukur ketimpangan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *Indeks Williamson* adalah :

$$VW = \frac{(Y_i - Y)^2 (F_i / n)^{1/2}}{Y}$$

Dimana :

VW = Nilai Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita daerah

Y = PDRB perkapita DIY

F_i = Jumlah penduduk daerah I

N = Jumlah penduduk DIY

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, wilayah Kodya Yogyakarta mempunyai ketimpangan yang paling tinggi dibandingkan dengan

daerah tingkat II lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di wilayah masing-masing dan kesempatan kerja dari tahun 1971-1995 ternyata di 5 daerah tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta telah terjadi perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Sektor yang tumbuh cepat di wilayah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan nilai ($LQ > 1$) adalah sektor pertambangan dan penggalian untuk kabupaten Kulon Progo, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk kabupaten Bantul, sektor pertanian untuk kabupaten Gunung Kidul, sektor industri, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan untuk kabupaten Sleman, sedangkan untuk kodya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.